



**BADAN KEAHLIAN  
DPR RI**  
*Bridging research to parliament  
Evidence based policy making*

## PEMERIKSAAN KESEHATAN MENTAL GRATIS BAGI REMAJA

**Sulis Winurini**

Analisis Legislatif Ahli Madya  
[sulis.winurini@dpr.go.id](mailto:sulis.winurini@dpr.go.id)

### Isu dan Permasalahan

Baru-baru ini seorang siswi di SMAN Banjarbaru ditemukan tewas bunuh diri di rumahnya. Korban terindikasi mengalami gangguan kesehatan mental selama dua tahun terakhir. Kasus ini menambah panjang daftar kasus bunuh diri remaja di Indonesia. Berdasarkan data dari Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), jumlah kasus bunuh diri di Indonesia sepanjang 2012–2023 mencapai 2.112 kasus, dan 985 kasus di antaranya terjadi pada remaja atau sekitar 46,63% dari total kasus.

Pada 2017, World Health Organization (WHO) mengungkapkan 3,9% dari 8.899 remaja Indonesia pernah melakukan percobaan bunuh diri. Percobaan tersebut setidaknya dilakukan sekali selama 12 bulan terakhir saat survei tersebut dilakukan. Lima tahun kemudian, pada 2022, Indonesia-National Adolescent Mental Health Survey (I-NAMHS) melaporkan bahwa satu dari tiga remaja (34,9%) atau setara 15,5 juta remaja mengalami masalah kesehatan mental dalam 12 bulan terakhir. Selain itu, satu dari 20 remaja (5,5%) atau setara 2,45 juta memiliki setidaknya satu gangguan mental dalam periode yang sama. Kemudian pada 2023, Survei Kesehatan Indonesia (SKI) menyebutkan, prevalensi penduduk dengan gejala depresi tertinggi terdapat pada kelompok remaja usia 15–24 tahun. Sebanyak 1% remaja mengalami depresi; 3,7% mengalami kecemasan; 0,9% mengalami *post traumatic syndrome disorder* (PTSD); dan 0,5% mengalami *attention-deficit/hyperactivity disorder* (ADHD). Dengan kondisi tersebut, pemeriksaan kesehatan mental menjadi kebutuhan.

Pemeriksaan kesehatan mental merupakan pemeriksaan awal untuk mengungkap adanya indikasi gangguan kesehatan mental. Pemeriksaan kesehatan mental bermanfaat untuk mendeteksi lebih dini atau menentukan risiko seseorang untuk mengalami gangguan mental, seperti gangguan kecemasan, depresi, gangguan bipolar, gangguan makan, atau PTSD. Semakin cepat gangguan mental terdeteksi, semakin efektif penanganan yang dapat diberikan oleh psikolog dan psikiater. Dengan deteksi dini, risiko terjadinya masalah yang lebih besar akibat gangguan mental, seperti ide bunuh diri, dapat dicegah.

Pemeriksaan Kesehatan Gratis (PKG) yang baru saja dicanangkan pemerintah menjadi langkah positif karena memperluas akses masyarakat untuk meningkatkan kesehatan, termasuk kesehatan mental. PKG diberikan kepada seluruh kelompok sasaran melalui berbagai cara, yaitu: 1) PKG Hari Ulang Tahun ditujukan bagi bayi dan anak hingga usia 6 tahun (balita dan anak prasekolah) serta bagi usia 18 tahun ke atas (dewasa dan lanjut usia); 2) PKG Sekolah ditujukan bagi anak usia 7–17 tahun (usia sekolah dan remaja) yang dilaksanakan setiap tahun ajaran baru; 3) PKG Khusus ditujukan bagi ibu hamil, bayi, dan anak hingga usia 6 tahun (balita dan anak prasekolah). Remaja dapat memperoleh PKG melalui dua cara, yaitu PKG Hari Ulang Tahun (bagi remaja usia 18 tahun) atau PKG sekolah (bagi remaja usia di bawah 18 tahun).

PKG kesehatan mental memiliki jadwal pemeriksaan berbeda. PKG untuk anak usia sekolah akan dilakukan saat tahun ajaran baru dimulai, tahun ini di bulan Juli 2025. Pemeriksaan ini akan dilakukan langsung di sekolah untuk memudahkan siswa tanpa mengganggu proses

belajar mereka. Sementara itu, PKG untuk di luar usia sekolah dilakukan saat hari ulang tahun, ditambah satu bulan, dengan cara mendaftar melalui aplikasi Satu Sehat Mobile (SSM). Pemeriksaan akan diberikan dalam bentuk kuesioner yang dapat mengindikasikan adanya gangguan kesehatan mental. Namun, diagnosis lebih lanjut tetap dibutuhkan untuk mendiagnosis gangguan spesifik yang dialami. PKG Hari Ulang Tahun dilaksanakan mulai Februari 2025 di 10 ribu puskesmas dan 15 ribu klinik yang tersebar di seluruh Indonesia.

## Atensi DPR

Komisi IX DPR RI perlu mengapresiasi langkah pemerintah, khususnya Kementerian Kesehatan (Kemenkes), dalam melaksanakan PKG. Dalam menjalankan fungsi pengawasannya, Komisi IX DPR RI perlu mengawasi persiapan, pelaksanaan, hingga evaluasi program yang dilakukan oleh Kemenkes. Komisi IX DPR RI juga perlu mendorong Kemenkes untuk mengatasi setiap tantangan yang ada, terutama terkait ketersediaan psikiater dan psikolog. Untuk mencegah dan menanggulangi masalah kesehatan mental, Kemenkes juga perlu didorong untuk melengkapi program ini dengan peningkatan edukasi dan kesadaran masyarakat tentang pentingnya kesehatan mental. Dalam menjalankan fungsi anggarannya, Komisi IX DPR RI perlu memastikan bahwa efisiensi anggaran di Kemenkes sebesar Rp19 triliun dari total Rp100,5 triliun tidak memengaruhi pelaksanaan program ini.

## Sumber

kompas.com, 5 Februari 2025;  
*Parlementaria*, 6 Februari 2025; dan  
 ums.ac.id, 21 Januari 2025.

## EDITOR

### Polhukam

Ahmad Budiman  
 Prayudi  
 Rachmi Suprihartanti S.  
 Novianti

## LAYOUTER

Devindra Ramkas O.  
 Ulyy Ngesti Pratiwi  
 Desty Bulandari  
 Yustina Sari

### Ekkuinbang

Sri Nurhayati Q.  
 Mandala Harefa  
 Ari Muliarta Ginting  
 Eka Budiyantri  
 Venti Eka Satya  
 Teddy Prasetiawan

Masyithah Aulia A.  
 Ulayya Sarfina  
 Yosephus Mainake  
 M. Z. Emir Zanggi  
 Muhammad Insan F.  
 Audry Amaradyaputri

### Kesra

Trias Palupi K.  
 Luthvi Febryka Nola  
 Yulia Indahri

Timothy Joseph S. G.  
 Nur Sholikah P. S.  
 Fieka Nurul Arifa